Didaktik : Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 03, September 2026

KESIAPAN SEKOLAH DASAR BARU MENGHADAPI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN IZIN OPERASIONAL: SEBUAH KAJIAN PERSEKOLAHAN

Imel Sefanya Bako[1], Deta Maria Sri Darta[2], Henny Dewi Koeswati[3]
[1,2,3]Universitas Kristen Satya Wacana
992025061@student.uksw.id

ABSTRACT

When a foundation opens a new school, two obligations arrive at once: meeting the National Education Standards (NES) and securing a legally valid operating permit. This study looks closely at that situation at St. Andrew's Primary School Kuatnana, a newly established elementary school under Yayasan Pelita Anglikan Indonesia, a foundation that also runs institutions ranging from a kindergarten to a vocational nursing school. A descriptive qualitative single case study design was used, with data gathered through participatory observation, semi-structured interviews, document review, and literature study, then examined through a gap analysis against the eight NES. Findings show the school still has no valid operating permit, and four facility components a library, a playground, ICT facilities, and instructional aids remain unmet. Readiness across the eight NES is otherwise fairly solid, with five standards judged reasonably ready and three fully ready, so the more pressing obstacles sit in administration and facilities rather than in academic or managerial capacity. The study closes with a phased roadmap for meeting the standards, speeding up the permit process, and moving governance toward more participatory school-based management.

Keywords: School readiness, operational permit, national education standards, facilities and infrastructure, school-based management

ABSTRAK

Sebuah sekolah yang baru berdiri di bawah naungan yayasan pendidikan menanggung dua kewajiban sekaligus: memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan mengurus izin operasional yang sah. Kajian ini menelusuri situasi tersebut di St. Andrew's Primary School Kuatnana, sekolah dasar baru di bawah Yayasan Pelita Anglikan Indonesia, yayasan yang juga menaungi jenjang pendidikan mulai dari TK hingga SMK Program Keperawatan. Pendekatan yang dipakai adalah kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal. Data dihimpun melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, telaah dokumen, dan studi kepustakaan, lalu dianalisis dengan analisis kesenjangan terhadap delapan SNP. Hasilnya, sekolah ini belum memiliki izin operasional yang sah, dan empat komponen sarana-prasarana berupa perpustakaan, lapangan, sarana TIK, serta alat peraga pembelajaran masih perlu dilengkapi. Walaupun demikian, kesiapan pada kedelapan SNP sesungguhnya cukup baik: lima standar berada pada kategori cukup siap dan tiga standar telah siap. Artinya, persoalan yang paling mendesak bukan pada kesiapan akademik atau manajerial, melainkan pada penyelesaian legalitas dan penyempurnaan fasilitas. Kajian ini menutup dengan peta jalan pemenuhan standar secara bertahap, percepatan pengurusan

izin, dan pergeseran tata kelola menuju manajemen berbasis sekolah yang lebih partisipatif.

Kata Kunci: Kesiapan sekolah, izin operasional, standar nasional pendidikan, sarana dan prasarana, manajemen berbasis sekolah

A. Pendahuluan

Membuka sekolah baru merupakan sebuah langkah strategis dalam rangka memperluas akses pendidikan, sekaligus sebagai wujud nyata partisipasi masyarakat dan badan hukum swasta dalam menopang penyelenggaraan pendidikan nasional. Namun mendirikan sekolah tidak hanya sekadar membangun gedung dan membuka pendaftaran siswa; Ada dua kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan kepemilikan izin operasional dari pemerintah daerah yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bekerja sama dengan dinas teknis terkait seperti Dinas Pendidikan. Devi (2021) menegaskan bahwa keberhasilan proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta pengelolaannya yang optimal. Hal ini sejalan dengan hasil temuan dilapangan yang cukup mencerminkan kenyataan bahwa pemenuhan standar tidak sekadar urusan administratif, melainkan fondasi bagi mutu pembelajaran itu sendiri.

Secara regulasi, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan mewajibkan setiap satuan pendidikan memenuhi delapan standar, yaitu kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan. Ketentuan ini kemudian diperkuat lagi oleh Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana, yang merinci kriteria minimal ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya. Kedelapan standar inilah yang menjadi prasyarat mutlak sebelum sebuah sekolah dapat mengantongi izin operasional yang sah.

secara manajerial, keberhasilan sekolah baru sangat ditentukan oleh kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola sumber daya sejak tahap awal berdiri (Fauzi, 2021). Temuan ini sejalan dengan apa yang ditemukan Setiawan dkk (2022),

bahwa peran kepala sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) sangat menentukan efektivitas pengelolaan mutu, khususnya bagi sekolah yang masih berada dalam tahap konsolidasi kelembagaan. Tanjung dkk (2022) menambahkan satu hal penting: manajemen mutu pendidikan pada akhirnya tidak terlepas dari komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.

Kajian ini berangkat dari kondisi nyata St. Andrew's Primary School Kuatnana, sekolah dasar baru yang menjadi bagian dari satu kompleks pendidikan berjenjang mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMK Program Keahlian Keperawatan yang seluruhnya bernaung di bawah Yayasan Pelita Anglikan Indonesia. Ketika kajian ini dilakukan, sekolah tersebut belum memiliki izin operasional yang sah, dan fasilitas pembelajarannya belum sepenuhnya memenuhi kriteria minimal standar sarana dan prasarana. Fitra (2021), dalam kajiannya terhadap sekolah swasta di bawah satu yayasan, menemukan bahwa keterbatasan sumber daya pada tahap awal berdiri kerap berdampak langsung pada lemahnya kinerja pengelolaan.

Selain persoalan legalitas dan fasilitas, sistem manajemen sekolah yang dikaji masih cenderung sentralistik, dengan pengambilan keputusan terpusat pada yayasan dan kepala sekolah, tanpa diimbangi mekanisme tata kelola partisipatif yang melibatkan komite sekolah dan dewan guru secara memadai. Wulogening & Timan (2020) menunjukkan bahwa perencanaan kepala sekolah yang baik, didukung prinsip *Total Quality Management,* terbukti meningkatkan efektivitas pengelolaan sekolah secara menyeluruh. Sementara itu, Hidayat dkk (2025) menemukan bahwa keberhasilan kepala sekolah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sangat dipengaruhi oleh seberapa besar ruang otonomi manajerial yang diberikan yayasan, adapun berdasarkan hasil pengamatan ruang ini belum diberikan di sekolah ini.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan paradigma pengelolaan yang memberi otonomi lebih luas kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan yang partisipatif. Kartini dkk (2025) menjelaskan bahwa manajemen berbasis sekolah memberikan wewenang kepada sekolah untuk

mengelola dirinya secara mandiri namun tetap berada dalam koridor akuntabilitas kelembagaan, dan penerapannya yang melibatkan guru serta orang tua terbukti berkontribusi signifikan pada peningkatan mutu belajar siswa. Pada satuan pendidikan swasta, yayasan memegang peran sentral sebagai badan penyelenggara, tetapi menurut Gaol & Subarian (2018) mengingatkan bahwa kepala sekolah akan berperan optimal jika yayasan memberi ruang kewenangan yang memadai. Tanaem (2023), dalam kajiannya pada sekolah berbasis keagamaan, menemukan bahwa sentralisasi kewenangan yayasan tanpa mekanisme *checks and balances* cenderung memperlambat respons sekolah terhadap kebutuhan yang mendesak.

Berdasarkan hasil penelusuran, studi yang menganalisis tiga dimensi kesiapan sekolah sekaligus legalitas operasional, sarana dan prasarana, serta tata kelola dalam satu kerangka analisis pada konsep yayasan multijenjang, masih sangat minim ditemukan. Penelitian-penelitian sebelumnya seperti seperti Fitra (2021), Hidayat dkk (2025), serta Setiawan dkk (2022), cenderung mengkaji ketiga dimensi tersebut secara terpisah, sehingga belum memberi gambaran utuh tentang bagaimana ketiganya saling berkaitan pada sekolah yang baru berdiri.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini disusun untuk menjawab lima pertanyaan: bagaimana kondisi pemenuhan izin operasional sekolah; bagaimana tingkat kesiapan sarana dan prasarana pembelajaran dibandingkan dengan SNP; bagaimana karakteristik sistem manajemen yang terpusat pada yayasan dan kepala sekolah serta implikasinya terhadap Standar Pengelolaan; bagaimana tingkat kesiapan sekolah pada masing-masing dari delapan SNP secara menyeluruh; dan strategi berbasis bukti apa yang bisa direkomendasikan untuk mempercepat pemenuhan SNP dan persyaratan operasional sekolah. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kondisi izin operasional, menganalisis kesiapan sarana-prasarana, menelaah karakteristik sistem manajemen yayasan, memetakan kesiapan kedelapan SNP melalui analisis kesenjangan, serta merumuskan rekomendasi strategis dan peta jalan percepatan pemenuhan standar.

Secara teoretis, kajian ini diharapkan memperkaya literatur

manajemen pendidikan, khususnya model analisis kesiapan kelembagaan bagi sekolah baru di bawah struktur yayasan multijenjang. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan menjadi masukan bagi yayasan dan kepala sekolah dalam memperbaiki tata kelola dan pemenuhan standar, sekaligus menjadi referensi bagi dinas pendidikan dalam membina satuan pendidikan yang baru berdiri. Penelitian ini dibatasi pada analisis kesiapan jenjang Sekolah Dasar sebagai unit analisis utama, meskipun konteks kelembagaan yayasan yang menaungi TK hingga SMK Keperawatan turut disinggung sejauh relevan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus tunggal, mengikuti prosedur yang dikembangkan Yin (2023). Pendekatan kualitatif dipilih karena persoalan yang dikaji melibatkan banyak pihak yakni yayasan, kepala sekolah, dan guru sehingga sulit direduksi menjadi data kuantitatif semata.

Penelitian ini dilaksanakan di St. Andrew's Primary School Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengumpulan data berlangsung sekitar sembilan minggu, dari 20 April sampai 20 Juni 2026, dengan empat tahapan: orientasi lapangan dan perizinan penelitian pada 20–27 April 2026; pengumpulan data primer melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam pada 28 April–4 Juni 2026; telaah dokumen kelembagaan dan studi kepustakaan yang berjalan paralel pada 5–11 Juni 2026; serta analisis, verifikasi, dan penyusunan laporan akhir pada 12–20 Juni 2026.

Subjek kajian mencakup pengurus yayasan, kepala sekolah, dan tenaga pendidik pada satuan pendidikan dasar. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling, dengan kriteria informan kunci adalah pihak yang langsung terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial sekolah, yaitu ketua yayasan, kepala sekolah, dan dua perwakilan dewan guru. Objek kajian difokuskan pada tiga aspek utama yaitu izin operasional, sarana dan prasarana pembelajaran, serta sistem manajemen kelembagaan yang selanjutnya dianalisis terhadap kedelapan SNP.

Data dikumpulkan lewat empat cara yang saling melengkapi: observasi partisipatif terhadap kondisi

fisik bangunan dan fasilitas pembelajaran menggunakan lembar *checklist* sarana dan prasarana yang disusun berdasarkan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023; wawancara semi-terstruktur dengan ketua yayasan, kepala sekolah, dan perwakilan dewan guru; telaah dokumen legalitas yayasan, profil sekolah, dan data sarana dan prasarana; serta studi kepustakaan atas regulasi terbaru dan literatur ilmiah mutakhir. Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri *(human instrument)*, dibantu pedoman wawancara, lembar observasi, dan pedoman telaah dokumen yang disusun berdasarkan kerangka tiga pilar kesiapan sekolah dan divalidasi secara konseptual sebelum digunakan di lapangan.

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, diperkaya dengan analisis kesenjangan yang membandingkan kondisi riil sekolah dengan ketentuan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan persyaratan izin operasional. Untuk menjaga kredibilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber (membandingkan keterangan yayasan, kepala sekolah, dan guru) dan triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen). Keabsahan data lebih lanjut diuji melalui kredibilitas lewat triangulasi dan member checking, transferabilitas melalui deskripsi konteks yang rinci, dependabilitas melalui audit trail proses penelitian, serta konfirmabilitas melalui konsistensi antara data, interpretasi, dan temuan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Profil Kelembagaan dan Konteks Yayasan Multijenjang

St. Andrew's Primary School Kuatnana adalah satuan pendidikan dasar baru yang berada dalam satu lingkungan kelembagaan pendidikan berjenjang di bawah Yayasan Pelita Anglikan Indonesia, terdiri atas TK, SD, SMP, hingga SMK Program Keahlian Keperawatan. Satu yayasan yang menaungi seluruh jenjang ini membuka peluang efisiensi sumber daya dan sinergi lintas jenjang, namun Fitra (2021) mengingatkan bahwa kondisi serupa juga berpotensi memicu kompetisi internal atas alokasi sumber daya antarjenjang apabila tidak diatur dengan kebijakan pembagian

anggaran yang jelas. Kondisi ini menuntut tata kelola kelembagaan yang lebih kompleks, karena setiap jenjang memiliki ketentuan SNP dan persyaratan operasional yang berbeda, termasuk SMK Keperawatan yang tunduk pada ketentuan tambahan terkait standar kompetensi tenaga kesehatan.

Kondisi dan Kesiapan Izin Operasional

Hasil kajian menunjukkan bahwa sekolah dasar yang diteliti sampai saat ini belum memiliki izin operasional yang sah dari dinas pendidikan setempat. Pengajuan izin operasional umumnya menuntut kelengkapan dokumen legalitas yayasan, bukti penguasaan lahan atau bangunan, profil sarana-prasarana, daftar pendidik dan tenaga kependidikan, serta dokumen kurikulum dan rencana pembiayaan. Ketiadaan izin operasional pada sekolah ini berimplikasi pada beberapa hal: Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang belum dapat diterbitkan secara definitif sehingga sekolah belum tercatat dalam Dapodik; status ijazah peserta didik yang berpotensi bermasalah secara legal di kemudian hari; keterbatasan akses terhadap bantuan operasional sekolah (BOS); risiko sanksi administratif; serta menurunnya kepercayaan publik terhadap legitimasi kelembagaan sekolah.

Kesiapan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Fasilitas pembelajaran pada sekolah dasar yang dikaji belum sepenuhnya memenuhi kriteria minimal sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana. Tabel 1 menyajikan hasil pemetaan kondisi sarana dan prasarana dibandingkan dengan ketentuan minimal.

Tabel 1. Pemetaan Kondisi Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Jenis Sarana/Prasarana	Ketentuan Minimal	Kondisi Riil	Status
1	Ruang Kelas	Sesuai jumlah rombongan belajar	Tersedia	Sesuai
2	Ruang Perpustakaan	Wajib tersedia	Belum tersedia	Belum Terpenuhi
3	Ruang Guru	Wajib tersedia	Tersedia	Sesuai
4	Ruang Kepala Sekolah	Wajib tersedia	Tersedia	Sesuai
5	Ruang UKS	Wajib tersedia	Tersedia	Terpenuhi

6	Toilet/Sanitasi	Terpisah & memadai	Tersedia	Sesuai
7	Tempat Ibadah	Disarankan tersedia	Tersedia, dipakai bersama	Sesuai
8	Lapangan/Area Bermain	Wajib tersedia	Terbatas, dipakai bersama jenjang lain	Belum Sesuai
9	Sarana TIK	Disarankan tersedia	Sangat terbatas	Belum Terpenuhi
10	Alat Peraga Pembelajaran	Sesuai kurikulum	Belum lengkap	Belum Terpenuhi

Dari sepuluh komponen sarana dan prasarana yang dianalisis pada Tabel 1, enam telah dinilai sesuai atau terpenuhi, yaitu ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang UKS, toilet/sanitasi, dan tempat ibadah. Empat komponen lainnya, yaitu ruang perpustakaan, lapangan atau area bermain, sarana TIK, dan alat peraga pembelajaran, masih berada pada kategori belum sesuai atau belum terpenuhi. Mengacu pada Devi (2021), kondisi ini menunjukkan bahwa sarana dasar yang menopang aktivitas administratif dan kesehatan sekolah sudah relatif baik, tetapi lembaga belum sepenuhnya memiliki sistem manajemen sarana dan prasarana yang sistematis pada komponen yang menopang mutu akademik dan literasi. Ketiadaan ruang perpustakaan patut menjadi perhatian utama, mengingat perpustakaan bukan hanya sumber bahan ajar, tetapi juga instrumen penumbuhan budaya literasi peserta didik usia sekolah dasar.

Keterbatasan sarana TIK juga menjadi temuan yang cukup signifikan. Permana (2024) menegaskan bahwa efektivitas media pembelajaran berbasis teknologi merupakan determinan penting mutu pendidikan di era digitalisasi, sehingga keterbatasan ini berpotensi menghambat adaptasi sekolah terhadap tuntutan pembelajaran abad ke-21.

Sistem Manajemen Berpusat pada Yayasan dan Kepala Sekolah

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pengelolaan sekolah dasar yang dikaji masih bersifat sentralistik, dengan seluruh keputusan strategis termasuk perencanaan kurikulum, rekrutmen tenaga pendidik, dan pengelolaan anggaran masih berada di tangan yayasan dan kepala sekolah. Komite sekolah belum berfungsi secara optimal, dan keterlibatan dewan guru dalam pengambilan keputusan masih bersifat formalitas. Kondisi ini berbeda dari prinsip MBS yang dikemukakan

Anwar (2021), yang menekankan bahwa kemandirian sekolah seharusnya disertai distribusi kewenangan yang proporsional.

Pola manajemen semacam ini berimplikasi pada lemahnya mekanisme perencanaan partisipatif dalam penyusunan RKS dan RKAS, minimnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengawasan program sekolah, potensi tumpang tindih kewenangan antarjenjang dalam satu yayasan, serta ketergantungan tinggi terhadap figur kepala sekolah dan pengurus yayasan dalam keputusan operasional sehari-hari yang dapat menimbulkan risiko keberlanjutan organisasi apabila terjadi pergantian pimpinan. Wulogening & Timan (2020) menunjukkan bahwa penerapan *Total Quality Management* dalam perencanaan kepala sekolah mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan secara terukur, sementara Tanaem (2023) menemukan bahwa sentralisasi kewenangan yayasan tanpa mekanisme *checks and balances* cenderung memperlambat respons sekolah terhadap kebutuhan teknis yang mendesak.

Analisis Kesenjangan terhadap Delapan Standar Nasional Pendidikan

Tabel 2. Analisis Kesenjangan terhadap Delapan Standar Nasional Pendidikan

No	Standar Nasional Pendidikan	Kondisi Saat Ini	Tingkat Kesiapan
1	Standar Kompetensi Lulusan	Capaian pembelajaran mengacu kurikulum nasional, dokumentasi belum lengkap	Cukup Siap
2	Standar Isi	Kurikulum tersusun, perangkat ajar belum lengkap	Cukup Siap
3	Standar Proses	Pembelajaran berjalan, supervisi akademik belum rutin	Cukup Siap
4	Standar Penilaian	Penilaian berjalan, instrumen belum terstandardisasi	Cukup Siap
5	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	Jumlah pendidik memadai	Siap
6	Standar Sarana dan Prasarana	Sarana dasar terpenuhi; perpustakaan, lapangan, TIK, alat peraga belum	Cukup Siap
7	Standar Pengelolaan	Manajemen masih terpusat pada yayasan dan kepala sekolah	Siap
8	Standar Pembiayaan	Bersumber dari yayasan, RKAS partisipatif belum ada	Siap

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2, dari delapan SNP, lima standar berada pada kategori cukup siap dan tiga lainnya (Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pengelolaan, dan Pembiayaan) telah berada pada kategori siap, sehingga tidak ada standar yang secara substantif belum siap. Temuan ini menegaskan bahwa secara akademik dan kelembagaan, St. Andrew's Primary School Kuatnana pada dasarnya telah memiliki fondasi yang cukup memadai untuk beroperasi sebagai satuan pendidikan. Hambatan utamanya bukan pada kesiapan substantif kedelapan standar, melainkan pada penyelesaian dokumen administratif izin operasional dan penyempurnaan empat komponen sarana-prasarana yang masih tersisa.

2. Pembahasan

Temuan kajian ini menegaskan relevansi kerangka berpikir tiga pilar legalitas, sarana-prasarana, dan tata kelola sebagai faktor yang saling terkait. Ketiadaan izin operasional pada sekolah yang dikaji bukan sekadar persoalan administratif yang berdiri sendiri, melainkan konsekuensi langsung dari belum terpenuhinya standar sarana-prasarana dan lemahnya tata kelola partisipatif. Temuan ini memperkuat pandangan Fauzi (2021) bahwa keberhasilan sekolah baru sangat ditentukan oleh kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola sumber daya secara terintegrasi, bukan menangani setiap standar secara terpisah.

Dari perspektif teori organisasi pendidikan, sentralisasi manajemen pada tahap awal berdirinya sekolah bisa dipahami sebagai fase yang wajar terjadi pada organisasi rintisan. Namun bila berlangsung terlalu lama tanpa transisi menuju tata kelola partisipatif, kondisi ini berpotensi menjadi hambatan struktural yang permanen bagi pemenuhan Standar Pengelolaan. Temuan Setiawan dkk (2022), yang menunjukkan korelasi positif antara penerapan MBS dan peningkatan mutu sekolah, memperkuat urgensi transformasi tata kelola sebagai strategi jangka menengah-panjang, sekaligus menjadi dasar argumen bahwa percepatan pemenuhan SNP tidak dapat dilepaskan dari reformasi tata kelola kelembagaan secara menyeluruh. Herliani dkk (2025) menegaskan bahwa penerapan MBS yang melibatkan guru dan orang tua secara aktif terbukti berkontribusi signifikan pada peningkatan mutu belajar siswa.

Sebagai peta jalan percepatan, dalam jangka pendek (0–6 bulan) sekolah perlu mengajukan permohonan izin operasional secara resmi dengan melengkapi dokumen persyaratan, menginventarisasi dan memenuhi sarana dasar yang paling mendesak, serta membentuk dan mengaktifkan komite sekolah sebagai langkah awal tata kelola partisipatif. Dalam jangka menengah (6–18 bulan), sekolah perlu menyusun RKS dan RKAS secara partisipatif bersama dewan guru dan komite sekolah, melengkapi sarana TIK dan alat peraga pembelajaran, serta meningkatkan kualifikasi pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi. Dalam jangka panjang (di atas 18 bulan), sekolah perlu membangun ruang perpustakaan dan laboratorium sederhana, mentransformasikan sistem manajemen menuju manajemen berbasis sekolah yang terdesentralisasi namun tetap terkoordinasi dengan yayasan, serta melakukan evaluasi berkala atas pemenuhan kedelapan SNP.

Kajian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diungkapkan secara jujur. Sebagai studi kasus tunggal, temuan ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik, melainkan untuk memberi pemahaman mendalam *(analytic generalization)* sebagaimana dianjurkan Yin (2023). Data kondisi sarana-prasarana bersifat snapshot pada periode pengamatan tertentu, dan keterbatasan akses terhadap dokumen keuangan yayasan membuat analisis pada Standar Pembiayaan bersifat indikatif.

D. Kesimpulan

Sekolah dasar yang dikaji belum memiliki izin operasional yang sah, sehingga berisiko menghadapi persoalan legal-administratif, termasuk ketidakabsahan NPSN dan status ijazah peserta didik. Sebagian besar sarana dan prasarana pembelajaran telah memenuhi standar minimal, tetapi empat komponen masih belum terpenuhi, yaitu ruang perpustakaan, lapangan atau area bermain, sarana TIK, serta alat peraga pembelajaran. Sistem manajemen yang terpusat pada yayasan dan kepala sekolah, tanpa keterlibatan optimal komite sekolah dan dewan guru, menjadi faktor penghambat utama pemenuhan Standar Pengelolaan.

Dari delapan SNP, lima standar berada pada kategori cukup siap dan tiga lainnya telah berada pada kategori siap, sehingga hambatan utama

sekolah bukan pada kesiapan substantif standar, melainkan pada penyelesaian legalitas izin operasional dan penyempurnaan sebagian komponen sarana-prasarana. Ketiga pilar kesiapan sekolah yakni legalitas, sarana-prasarana, dan tata kelola, saling memengaruhi satu sama lain, sehingga strategi percepatan pemenuhan standar perlu dirancang secara terpadu, bukan parsial.

Bagi yayasan dan kepala sekolah, disarankan untuk segera memprioritaskan pengurusan izin operasional secara paralel dengan perbaikan sarana dan transformasi tata kelola. Bagi dinas pendidikan setempat, disarankan memberikan pendampingan teknis kepada sekolah baru dalam proses pemenuhan persyaratan operasional, khususnya pada lembaga yayasan multijenjang. Bagi yayasan, disarankan mempertimbangkan pembentukan unit pengelola pendidikan tersendiri guna mengurangi beban manajerial terpusat. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan kajian lanjutan yang bersifat kuantitatif atau mixed-methods untuk mengukur signifikansi masing-masing variabel kesiapan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, M. (2021). Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di Madrasah (Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah). 2(8), 306–312.

Devi, A. D. (2021). Edudikara: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran — Standarisasi dan Konsep Sarana Prasarana Pendidikan. 6, 117–128.

Fauzi, F. (2021). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa di SMP 10 Nopember Sidoarjo. 61–76.

Fitra, N. (2021). Pengaruh Manajemen Sekolah Terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri 7 Palopo.

Gaol, N. T. L., & Subarian, P. (2018). Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru.

Herliani, H., Lilianti, L., & Halima, H. (2025). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah untuk Pengembangan Profesional Guru: Tantangan dan Peluang. 8(1), 15–28.

Hidayat, M. R., Giatman, M., & Mardizal, J. (2025). Hubungan Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Tingkat Partisipasi Guru dalam

Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah. 10(4), 1988–1997.

Kartini, Oktaviana, & Nikmah, P. (2025). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar.

Permana, B. S. (2024). Teknologi Pendidikan: Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi di Era Digitalisasi. 4(1).

Setiawan, M. R., Sudrajat, A., & Tedjawiani, I. (2022). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam Meningkatkan Mutu Sekolah (Studi Deskriptif tentang Peran Kepala Sekolah dalam MBS pada SMPN 3 dan SMPN 4 Malangbong). 5, 1335–1346.

Tanaem, Y. E. (2023). Implementation of School Based Management in Christian Religion High School Kupang. 11(1), 24–33.

Tanjung, R., Supriani, Y., Mayasari, A., & Arifudin, O. (2022). Manajemen Mutu dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Wulogening, H. I., & Timan, A. (2020). Implementasi Total Quality Management (TQM) dalam Sistem Manajemen Perencanaan Kepala Sekolah. 8(2), 137–146.

Yin, R. K. (2023). Case Study Research and Applications: Design and Methods. 11(1), 2016–2019.